Awasi Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Pemerintah Bakal Buka Bursa Kripto Selambat Akhir Tahun Ini

Tanggal	: Selasa , 01 Juni 2021
Media	: Tribunnews.com
Halaman	: -
Wartawan	: Rimna Sari Bangun
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Kripto

Awasi Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Pemerintah Bakal Buka Bursa Kripto Selambat Akhir Tahun Ini

Selasa, 1 Juni 2021 15:49



Ilustrasi bitcoin, aset kripto. Pemerintah akan membuka bursa Kripto paling lambat akhir tahun 2021

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kementerian Perdagangan akan membentuk bursa kripto selambat-lambatnya akhir tahun ini sebagai salah satu wadah untuk mengawasi jalannya transaksi perdagangan mata uang kripto di Indonesia.

"Memang di akhir tahun ini paling lambat akan dibentuk bursa. Kita juga juga berpandangan bahwa sirkulasi dan arus crypto harus banyak di dalam negeri ketimbang harus di luar negeri,"ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan bersama dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (31/5/2021).

Dia berpendapat apabila bursa berhasil dibentuk di akhir tahun ini, Indonesia akan menjadi negara pertama yang pasar bursanya diatur oleh pemerintah.

"Di negara lain tidak ada, di AS yang mengatur itu swasta, bahkan di Tiongkok itu dilarang. Jadi kalau bisa berpotensi menguntungkan buat kita, mengapa tidak, selama regulasinya terbilang diatur," ungkapnya.

Jerry juga memastikan bahwa aset krippto adalah aset yang bisa diperdagangkan oleh komunitas dan bukan mata uang. Sebab diakui dia, masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kripto bisa digunakan sebagai uang.

Oleh sebab itu lanjut dia, dengan dibuatnya peraturan atau regulasi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi alias Bappebti, diharapkan transaksinya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Jerry juga menilai bahwa transaksi kripto cukup potensial. Bahkan per hari bisa mencapai Rp 1,7 triliun.

Baca juga: Antisipasi Kerugian Saat Berinvestasi Aset Kripto, Para Pemula Harus Simak Trik Berikut Ini

Lima risiko besar maraknya perdagangan cryptocurrency

Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahwa risiko cryptocurrency masih sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

BI menyebut ada lima risiko besar yang harus dihadapi dengan meningkatnya transaksi cryptocurrency di Indonesia

Rosalia Suci Handayani, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI, mengungkapkan risiko cryptocurrency ini dalam diskusi daring yang digelar oleh Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sabtu (29/5) pekan lalu.

Pertama, risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila cryptocurrency atau crypto asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,

Kedua, risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan meningkatnya transaksi cryptocurrency di Indonesia.

Ketiga, risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto asset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan akibat maraknya cryptocurrency ini.

Keempat, lonjakan transaksi cryptocurrency di Indonesia juga menyebabkan risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Kelima, BI juga menyoroti risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi juga sangat besar dengan maraknya cryptocurrency ini.

Karena itu BI mengharapkan perlu ada pengaturan dan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait perdagangan aset crypto dan cryptocurrency ini. (*)